

**PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979
DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI
THE ROLE OF WOMEN IN IRAN POST 1979 REVOLUTION IN SHIRIN
EBADI'S PERSPECTIVE**

Moh Choirul Anam

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
anamcuitt3@gmail.com

Fawaizul Umam

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
fawaizulumam@gmail.com

Aminullah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
aminullah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif peran perempuan di bawah rezim Syah Pahlevi. Selain itu, penelitian ini untuk mengetahui kondisi sosial, politik, dan ekonomi Iran pasca revolusi 1979. Terakhir, penelitian ini ingin mengetahui kedudukan perempuan dalam pandangan Shirin Ebadi. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan gender dan pendekatan HAM. Dalam menghimpun data, peneliti menggunakan karya asli dari Shirin Ebadi sebagai sumber primer sedangkan data sekunder diambil dari karya-karya serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mengolah data, peneliti memakai analisis isi atau content analysis. Hasil analisis menjelaskan bahwa Shirin Ebadi memberikan kontribusi besar terhadap perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan hak dengan kaum laki-laki. Ia adalah salah satu inisiator pendiri Pusat Pembelaan Hak Manusia di Iran. Tidak hanya itu, ia menjadi hakim perempuan pertama di Iran. Karena menangani kasus-kasus kejahatan besar yang menyeret tokoh-tokoh penting Iran, ia pernah dipenjara oleh pemerintah Iran. Pada tahun 2003, Komite Nobel Norwegia menetapkan Shirin Ebadi sebagai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam membela kaum perempuan Iran mendapatkan hak-hak mereka.

Kata Kunci: Shirin Ebadi, Konservatisme, dan Gender.

Abstract

This study aims to comprehensively find out the role of women under the Shah Pahlavi regime. In addition, this study aims to determine the social, political, and economic conditions of Iran after the 1979 revolution. Finally, this study aims to determine the position of women in Shirin Ebadi's view. This research includes library research using a gender approach and a human rights approach. In collecting data, the researcher used the original work of Shirin Ebadi as the primary source, while the secondary data was taken from the works and data related to this research. To process the data, the researcher uses content analysis or content analysis. The results of the analysis explain that Shirin Ebadi has made a big contribution to the struggle of women to get equal rights with men. He was one of the founding initiators of the Center for Defending Human Rights

Moh Choirul Anam dkk, Peran Perempuan Di Iran Pasca Revolusi 1979 35

in Iran. Not only that, she became the first female judge in Iran. For handling major criminal cases that dragged important Iranian figures, he was imprisoned by the Iranian government. In 2003, the Norwegian Nobel Committee recognized Shirin Ebadi as the winner of the Nobel Peace Prize for her struggle to defend Iranian women for their rights.

Keywords: Shirin Ebadi, Conservatism, and Gender.

Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban di dunia, kaum perempuan sedikit yang merasakan kebebasan dan kenyamanan dalam mengekspresikan keinginannya di ruang publik. Kondisi ini perlahan mulai berubah saat Muhammad mendapatkan misi khusus untuk menegakkan emansipasi atau kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perempuan sebelumnya selalu dianggap sebagai subordinat atau manusia kelas dua. Dengan datangnya Muhammad, derajat perempuan dimuliakan dan sama di hadapan Tuhan, yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan¹.

Misi emansipatoris ini menjadi pijakan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan melepaskan diri dari penindasan. Dalam fokus perjuangannya, perempuan meluaskan isu perjuangannya dari perbudakan dan isu gender bergeser kepada isu-isu universal, seperti perjuangan rasisme, ketimpangan kelas, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan isu-isu besar lain. Sehingga, secara garis besar perjuangan perempuan adalah memerangi diskriminasi yang menghambat gagasan dan ide-ide perempuan untuk sebuah peradaban.²

Sebelum terjadi revolusi 1979, Iran menjadi negara yang berkembang pesat dalam bidang peradaban. Saat itu, kepala pemerintahan dipegang oleh Rezim Pahlevi yang berhaluan sekularisme. Pahlevi memberikan hak dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensinya agar memberikan dampak positif dalam berbagai bidang.³

Rezim Pahlevi mengaktualisasikan keberpihakannya terhadap perempuan dalam bentuk reformasi hukum tentang posisi perempuan. Dia menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, status sosial, dan pekerjaan. Perempuan mendapatkan akses terhadap pekerjaan sesuai dengan minatnya, seperti menjadi guru dalam bidang pendidikan, perawat, bahkan menjadi buruh pabrik. Perempuan saat itu mempunyai pekerjaan sesuai dengan pilihannya, bukan hanya pekerjaan domestik atau menjadi ibu rumah tangga atas dasar paksaan konstruksi sosial.⁴

Rezim Pahlevi terkesan baik dalam melindungi hak-hak perempuan, tapi masih ada celah dalam hal-hal kebijakan hukum keluarga dan undang-undang hak politik yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Contoh kasus dalam hal ini seperti perceraian (*thalaq*) tetap menguntungkan pihak laki-laki. Hak asuh atas anak tetap mengikat pihak perempuan. Hukum poligami dan *mut'ah* tetap saja berlaku. Bahkan pada tahun 1936, Pahlevi membuat kebijakan

¹ Hendri Herman Adinugraha dkk, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 41.

² Hendri Herman Adinugraha dkk, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan*, 41

³ Maryam Panah, *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution* Pluto Press, 2007, 232 pp. ISBN: 978-0-745-32621-4 (hbk) £45, hlm. 160

⁴ Anwar Sadat dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2020), hlm. 20

larangan memakai hijab di muka umum bagi perempuan.⁵

Kebijakan yang dibuat tanpa menyerap aspirasi publik ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk pemerintahan otoriter. Aktivistis perempuan bersama dengan masyarakat Iran secara umum geram dan melakukan aksi demonstrasi. Bibit revolusi mulai tumbuh sekitar tahun 1963, hingga terjadinya penggulingan Pahlevi pada Revolusi 1979 digantikan oleh pemimpin agung Ayatollah Khomeini. Selama revolusi berlangsung, perempuan secara terang-terangan memakai jilbab di depan umum sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah yang menindas hak-hak perempuan.

Pasca revolusi 1979, Khomeini menjalankan sistem pemerintahan Iran lebih kepada konservatisme. Konservatisme adalah lawan dari modernisme, artinya sistem pemerintahan Iran lebih mundur dari pada rezim sebelumnya. Pemerintah Iran seharusnya mengadopsi kebijakan modernis yang lebih kontekstual terhadap kemajuan zaman dari pada konservatisme yang cenderung kaku dalam merespon perubahan.⁶

Peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan pasca revolusi 1979, dapat diuraikan dengan beberapa catatan sebagai berikut:⁷

1. Bidang politik

Pada saat pemilihan dewan di Iran, perempuan memperoleh kursi di parlemen Islam Iran. Dalam perhitungan pemilu pertama (1980-1984) empat perempuan berhasil mencatatkan namanya di parlemen. Jabatan perempuan ini mewakili 6,1% dari jumlah keseluruhan anggota parlemen. Formasi perempuan ini terhitung sangat sedikit dibandingkan jumlah laki-laki yang lebih dominan.

2. Bidang Ekonomi

Pasca revolusi, kaum perempuan mendapatkan hak untuk bekerja di ranah publik meskipun gaji yang mereka terima lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dengan beban kerja yang sama. Terdapat perbedaan bidang pekerjaan antara perempuan yang tinggal di desa dan kota. Di kota perempuan memilih pekerjaan di bidang pendidikan, pengacara, sekretaris, pelayanan sipil, kesehatan dan lain sebagainya. Gaji mereka terhitung lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di desa-desa.

3. Bidang Pendidikan

Kaum perempuan mendapatkan jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi dan pelatihan teknik untuk perempuan yang kurang mampu secara finansial. Namun, pemerintah membuat aturan pembatasan jurusan di tingkat universitas. Sehingga perempuan tidak dapat memilih jurusan seperti hukum, kedokteran, dan teknik karena adanya aturan yang melarang perempuan mengambil jurusan tersebut. Persentase tingkat melek huruf perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan jumlah 35,5% (perempuan) dan 58,9% (laki-laki) pada 1976-1985.

Kalangan aktivis pasca revolusi membuat gerakan perubahan budaya dan sosial. Akan tetapi pemerintah memandangnya sebagai mata-mata barat yang mengganggu stabilitas nasional. Hal itulah yang membuat banyak kalangan aktivis diburu bahkan dibunuh dengan tuduhan agen dari barat. Pemerintah memandang gerakan pembangunannya sebagai sebuah ancaman negara. Segala macam bentuk gerakan akan dipolitisir oleh pemerintah sebagai

⁵ Anwar Sadat dkk, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam*, 20

⁶ Farinaz Basmechi, *Feminist Activism in Iran after the 1979 Revolution*, Texas, University of Nort Texas, hlm. 4.

⁷ Haleh Afshar, *Women and Work in Iran*, University of York, Political Studies (1997, XLV, 755-767, hlm. 760.

upaya untuk melemahkan tujuan perubahan budaya dan sosial.⁸

Di bawah rezim otoriter Khomeini perempuan dibatasi hak-haknya. Rezim Khomeini menampilkan Iran yang ultra konservatif sebagai tandingan terhadap dinasti Pahlevi yang kebarat-baratan. Pencabutan hak-hak perempuan ini dijadikan alasan mewujudkan pemeliharaan keamanan nasional. Reformasi kebijakan Iran dilakukan atas nama Islam, dengan representasi yang sempit dan misoginis.⁹

Revolusi Iran banyak dipengaruhi oleh mahasiswa revolusioner yang menuntut ilmu di Paris. Mereka belajar dengan dosen seperti Jean Paul Sartre, Jacques Lacan dan Henry Corbin. Dampak dari pertemuan ini, Islam dipandang sebagai sumber kekuatan untuk meruntuhkan penguasa yang zalim. Islam dikawinkan dengan teori pasca kolonial, filsafat barat, marxisme, kapitalisme dan kosmopolitanisme untuk menganalisis konstelasi politik Iran. Maka pemahaman generasi yang ikut berpartisipasi dalam revolusi menjadi lebih radikal.

Masyarakat Iran terbuka dalam hal penerimaan ilmu pengetahuan dari tokoh-tokoh non-Iran. Corbin sebagai salah satu filsuf barat yang dipersilahkan mengajar filsafat barat di Universitas Teheran. Dia terlibat debat mendalam dengan ulama Iran terkait relevansi tradisi Islam dengan realitas sosial. Corbin mendukung gagasan negara agama dan kemartiran yang diperoleh dari pembacaannya atas karya Martin Heidegger. Sehingga generasi revolusioner Iran dibekali teori-teori dari barat yang dirasa relevan dengan Islam.¹⁰

Sistem Pemilu Iran

Peran perempuan di negara Iran terbatas karena terdapat kebijakan-kebijakan yang mengikat. Misalnya, perempuan dibatasi dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Bentuk politik dan struktur pemerintahan Republik Islam Iran merupakan perpaduan yang menarik dan kompleks antara pemerintahan teokratis dan demokratis. Iran menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara, sehingga sistem hukumnya dirumuskan sesuai dengan ajaran yurisprudensi agama dan ajaran Syiah. Revolusi 1979 secara tegas mengubah sistem pemerintahan dan membentuk model pemerintahan Islam berdasarkan risalah politik 1970 Ayatollah Khomeini. Undang-undang yang ditetapkan dalam dokumen ini menekankan struktur pemerintahan teokratis dan republik dalam bidang politik. Sehingga, sistem politik dan struktur pemerintahan Iran dipegang oleh Pemimpin Tertinggi, yakni Ayatollah Khomeini yang bertugas memikul beban kepemimpinan dengan jabatan seumur hidup.¹¹

Pemimpin Tertinggi tersebut dipilih oleh 86 kelompok ulama yang disebut Majelis Ahli. Menurut konstitusi Iran, bertanggung jawab atas kebijakan umum Republik Islam Iran meliputi semua aspek kebijakan dalam dan luar negeri. Dia memegang otoritas yang besar dan menjabat sebagai Panglima angkatan bersenjata Iran. Dia sendiri yang mengendalikan semua angkatan perang, operasi khusus, dan keamanan Republik Islam. Bahkan dia mengangkat kepala peradilan, kepala radio, dan pemimpin shalat Jumat. Lebih jauh lagi, dia menentukan enam dari dua belas unsur Dewan Wali, sebuah lembaga berpengaruh yang meninjau dan menyetujui undang-undang yang bisa memveto calon kandidat pemilu.

⁸ Farinaz Basmehchi, *Feminist Activism*, 6.

⁹ Farinaz Basmehchi, *Feminist Activism*, 6

¹⁰ ROXANNE VARZI, *Iran's French Revolution: Religion, Philosophy, and Crowds*, ANNALS, AAPSS, 637, September 2011, 56

¹¹ Stephen, *The Islamic Republic of Iran*, 21.

Pasca revolusi, Iran dijalankan oleh dua Pemimpin Tertinggi, yaitu Ayatollah Khomeini menjabat sejak 1979 hingga wafatnya pada Juni 1989 dan penerusnya, Ayatollah Ali Khamenei yang diangkat oleh Majelis Ahli setelah itu dan memegang jabatan itu sampai wafatnya. Di luar hirarki yang jelas dalam ajaran Syi'ah, Khomeini menunjuk seorang penerus yang tidak diharapkan dalam hal keahlian agama maupun ahli yang diterima sebagai sumber teladan dari para pengikutnya. Dukungan Khomeini kepada Khamenei dianggap oleh banyak orang sebagai usaha untuk memastikan kelangsungan kebijakan Khomeini dibandingkan upaya untuk mencari penerus yurisprudensi Syi'ah yang benar. Di sisi lain, beberapa pengamat politik mencatat kurangnya legitimasi agama dalam membatasi Khomeini untuk memaksakan kebijakan yang dipandang sebagai penerapan ajaran Islam yang tepat dalam bidang politik.¹²

Walaupun sebagai otoritas tertinggi kedua di negara itu, Presiden Republik Islam Iran mempunyai kekuasaan yang signifikan. Presiden menjalankan fungsi kepala eksekutif pemerintah dan mengajukan calon untuk kabinet kepada Majelis untuk diangkat. Calon presiden dipilih oleh masyarakat Iran dengan cara pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun dan bisa menjabat kembali maksimal dua periode. Berdasarkan konstitusi Iran, presiden harus mempunyai kualifikasi seperti berikut: dia lahir dan berkebangsaan Iran, dia memiliki keterampilan administratif dan manajerial yang memadai, kesalehan dan kepercayaan, latar belakang personal yang bagus, dan keyakinan pada prinsip-prinsip dasar Republik Islam dan agama resmi negara.

Presiden mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan ekonomi, luar negeri, dan keamanan negara. Dia memiliki kekuasaan nominal atas Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan Kementerian Intelijen, meskipun kewenangannya ada di bawah persetujuan Pemimpin Tertinggi. Presiden memberikan tanda tangannya, kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang yang disahkan oleh Majelis. Tugasnya juga meliputi administrasi anggaran negara dan rencana pembangunan yang disahkan oleh Majelis.¹³

Setiap momen pemilihan umum presiden, bentrokan antara masyarakat dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Yang menjadi korban adalah masyarakat Iran sendiri. Pemerintah terpilih dan para aparatnya dengan keras menghukum mati tokoh-tokoh aktivis yang mengkritik sistem pemilihan umum. Sejak Februari 1979-Juni 1981, pengadilan Iran telah secara resmi menghukum mati 497 lawan politik rezim, namun jumlah korban mati sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar, sekitar tidak lebih dari seribu. Pemerintah menganggap pembunuhan tersebut berdasarkan kebenaran untuk melawan kejahatan. Karenanya, mengeksekusi pelaku kejahatan adalah misi besar umat Islam untuk mewujudkan kesempurnaan alam dan masyarakat.¹⁴

Di sisi lain, anggota yang disebut sebagai Pengawal Revolusi ikut terlibat dalam eksekusi di seluruh negeri. Pembalasan politik menjadi sangat lumrah dan tidak ada otoritas resmi untuk menghalangi tindakan tersebut. Kebrutalan ini menggambarkan kebijakan politik yang diskriminatif yang akan muncul di bawah kekuasaan Republik Islam. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan Pemimpin

¹² Home Office, *Country Policy and Information Note Iran: Illegal Exit*, 2022, diunduh pada laman: <https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-illegal-exit-iran-may-2022-accessible>, pada 20 Desember 2022, 8.

¹³ University of Pittsburgh, *A Comparison: The Islamic Revolution of 1979 and Iran's Green Movement of 2009, 2011*, diunduh pada laman: <http://d-scholarship.pitt.edu/7463/1/NameWithheld.BPhil2011>, pada 3 Februari 2022, 20.

¹⁴ University of Pittsburgh, *A Comparison: 22*.

Tertinggi menghasilkan sebuah konstitusi Islam baru pada awal Desember 1979. Selanjutnya, pada September 1980 munculnya perang Iran-Irak memberi legalitas terhadap pemerintah Islam untuk memusatkan kekuasaan dan memperbanyak aparaturnya. Contohnya, Kementerian Kehakiman membuat sebuah sistem hukum dan Kementerian Bimbingan Islam menciptakan “Revolusi Kebudayaan” pada April 1980 untuk menghapuskan “imperialisme budaya”, menghilangkan segala bentuk budaya yang bertentangan dengan pemerintah Islam.¹⁵

Lebih brutal lagi, kegiatan sewenang-wenang rezim diikuti dengan kampanye memberantas oposisi politik, khususnya kaum liberal dan kiri, dimana mereka menggunakan kampus sejak 1979 sampai 1981 untuk arena debat ideologis. Saat musim panas 1980, Dewan Revolusi membersihkan area kampus dari diskusi-diskusi politik bagi siapapun. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut, maka pelakunya akan dijatuhi hukuman. Tragedi berdarah antara mahasiswa dan aparat pemerintah terjadi di seluruh penjuru Iran dengan korban tewas 20 hingga 200 mahasiswa, sedangkan korban luka-luka lebih banyak lagi. Pada 1984, mayoritas lawan politiknya—monarkis, Tudeh, Mujahidin, Fadaiyan, dan Nasionalis—dimusnahkan oleh Republik Islam. Represi kekerasan yang meluas terhadap pemimpin partai ditambah strategi intimidasi terhadap mereka, partai-partai tersebut dipaksa untuk melakukan aktivitas mereka di luar Iran. Sebagai akibat dari kekerasan rezim, pada Juni 1985, 8.000 lebih lawan politik telah di hukum mati.

Alih-alih agama Islam membatasi hak-hak perempuan, Islam menjamin kebebasan perempuan untuk mengekspresikan peran gendernya. Dalam kitab al-Qur’an, Tuhan mengutus nabi Muhammad untuk menegakkan keadilan di antara semua makhluk. Misi ini mengarah kepada perilaku yang menghormati kemanusiaan, melindungi setiap kehidupan, dan menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain. Shirin Ebadi sepakat dengan interpretasi Islam seperti di atas, karenanya Islam lebih kontekstual terhadap perubahan zaman.¹⁶

Ebadi menempuh pendidikan di Universitas Teheran dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam. Menurutnya, perempuan termasuk dalam kategori politik, di mana mereka terlibat dalam revolusi Islam Iran 1979. Dalam mempelajari hukum pidana Islam, ia berkesimpulan bahwa kehidupan seorang perempuan bernilai setengah dari kehidupan seorang laki-laki. Hal ini menjadi alasannya untuk memberikan kritik terhadap pemahaman Islam yang merendahkan posisi peran perempuan. Pandangan politik tersebut membuatnya dicopot dari peran sebagai hakim pasca revolusi. Pada momen revolusi itu, mereka berbondong-bondong meninggalkan negara Iran karena tidak sepakat dengan pandangan penguasa yang berlaku. Namun, Ebadi percaya bahwa profesinya sebagai hukum adalah kewajiban untuk tinggal dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Iran.¹⁷

Perempuan adalah konstituen politik yang penting dalam pemilihan dan banyak yang mencalonkan diri untuk kursi di *majelis*. Namun, dalam kenyataannya, perempuan Iran tidak mendapatkan hak tersebut dalam sistem politik Iran yang maskulin di dunia. Anggota majelis perempuan merupakan proporsi yang tidak signifikan. Perempuan yang duduk di pemerintahan, seperti wakil presiden tidak memiliki pengaruh apapun pada masalah ekonomi, kebijakan luar negeri, politik, budaya, dan sosial. Partisipasi dan keterwakilan perempuan Iran dalam struktur politik formal termasuk terendah di dunia: 3 persen perwakilan

¹⁵ University, *A Comparison: The Islamic Revolution*, hlm. 24.

¹⁶ Home Office, *Country Policy and Information Note Iran: Illegal Exit*, hlm. 30.

¹⁷ University, *A Comparison: The Islamic Revolution*, hlm.31.

perempuan di parlemen dan 3 persen perempuan di posisi menteri pada 2012. Berbeda dengan negara-negara lain, Iran belum menerapkan kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan belum melaksanakan amanat CEDAW.¹⁸

Sepanjang sejarah empat puluh tahun, rezim gender Republik Islam telah menetapkan patriarkal. Rezim gender Iran mencerminkan susunan politik dan kelembagaan yang bercorak konservatif. Meskipun Iran diperintah oleh presiden terpilih dan parlemen yang beranggotakan ratusan orang namun dua lembaga utama tidak melalui proses pemilihan umum. Dengan demikian, sistem politik Iran tidak memiliki aturan-aturan yang mendukung “representasi deskriptif” dari perempuan. Selain itu, sebagai badan konstitusional yang memeriksa kandidat dan harus menyepakati rancangan undang-undang parlemen, Dewan Wali mencegah mereka yang dianggap tidak cukup loyal untuk mengakses kekuatan politik dan seringkali menolak undang-undang progresif.

Selain itu, Republik Islam juga berusaha menekan semua gerakan etnis, khususnya bangsa Kurdi, yang menuntut hak budaya dan politik bagi etnis minoritas. Suku Kurdi dan minoritas yang lain seperti Turkman dan Baluch, mereka adalah penganut Muslim Sunni dan ditindas karena perbedaan mazhab mereka. Umpamanya, saat musim gugur 1984, 94 anggota Dewan Tani di Turkman-Sahra ditangkap dan dibunuh, kemudian tubuhnya ditemukan di daerah terpencil dekat wilayah itu. Setelah kejadian itu, Ayatollah Khalkhali, seorang pendukung setia rezim, mengakui pembunuhan tersebut, “Saya membunuh 94 orang dan menganiaya orang-orang Turkman. Karena Iran dikuasai oleh rezim yang kejam, pembunuhan semacam ini sering terjadi pada dekade pertama pasca revolusi dan berlanjut secara sporadis.¹⁹

Sampai akhir 1980-an, represi politik, agama, dan etnis terus berlangsung, tapi rezim mengalihkan sebagian besar energinya pada perang dengan Irak. Akan tetapi, pada tahun 1988, ia harus menerima kenyataan bahwa Republik Islam tidak bisa bertahan lama dalam perang tersebut. Karenanya, lebih dari 1 juta pasukan Iran telah gugur dalam perang selama delapan tahun. Setelah menyetujui gencatan senjata PBB, Khomeini mengungkapkan kekecewaannya, “kematian dan kemartiran akan bisa lebih bisa saya tanggung, betapa saya bahagia karena saya telah bertahan dan telah melewati perjuangan berdarah demi resolusi tersebut.²⁰

Setelah perang berakhir, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khomeini mendapatkan banyak kritik yang berkembang terhadap sistem pemerintahan Republik Islam. Misalnya, Ayatollah Hoseyn Ali Montazeri, penerus Khomeini, mengkritik pemerintahan Islam Iran pada akhir 1980-an dan mengkampanyekan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Ketika Iran mengeksekusi lebih dari 3.000 tahanan perang tanpa pengadilan, dia secara terbuka mengkritik Khomeini dan menuduh pemerintah melanggar hak asasi manusia. Lebih keras

¹⁸ Valentine M. Moghadam, *Woman in the Islamic Republic of Iran: Legal Status, Social Position, and Collective Action*, tt, diunduh pada laman: <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/ValentineMoghadamFinal>, pada 3 Maret 2022. 9.

¹⁹ Shirin Saedi dan Amirhossein Vafa, *After Isolation: Mirrors between Parallel Worlds and New Conceptual Spaces of Activism in Post-Revolutionary Iran*, Millennium: Journal of International Studies 1–27 © The Author(s) 2019, diakses dari laman: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0305829819840800>, pada 11 Agustus 2022 pukul 15:48, 10.

²⁰ Shirin Saedi, *After Isolation: Mirrors between Parallel*, 7.

kritiknya, dia menuntut rezim untuk meminta maaf atas kesalahannya dan mengakui kesalahannya di depan publik.²¹

Pada Mei 1997, Mohammad Khatami, seorang ulama liberal, menjadi presiden Iran dengan memperoleh suara 70 persen. Kebijakannya dapat dikatakan bertolak belakang dengan rezim sebelumnya, karena partisipasi politik diperluas dan mendorong gerakan reformis baru. Pasca kemenangannya, para reformis mendirikan surat kabar baru yang mempromosikan diskusi publik dan bebas tentang kondisi politik Iran. Dalam dua tahun pertama jabatannya, publikasi pers negara itu meningkat empat kali lipat. Di sisi lain, polisi moral menoleransi pakaian Islami yang lebih modern dan toko-toko serta kedai kopi model Barat meluas di seluruh penjuru Iran. Peradilan dibuka kembali untuk perempuan, dan usia pernikahan dinaikkan menjadi 20 tahun.

Terlepas dari kemajuan di atas, rezim Islam konservatif menggunakan kekuatan yudisialnya untuk menentang upaya reformasi yang dilihatnya sebagai penyelewengan terhadap fondasi teologis negara. Anggota parlemen konservatif mencegah usaha legislatif Khatami, dan pemerintah menutup media dan menahan para pemimpin reformasi vokal seperti Shirin Ebadi. Selain itu, pada penghujung tahun 1998, empat reformis dan aktivis politik terkenal ditemukan tewas secara tragis. Tragedi pembunuhan ini adalah simbol peringatan bagi para reformis yang mengkritik keras rezim terutama dari kalangan mahasiswa. Pada Juli 1999, ulama konservatif mempersiapkan susunan undang-undang pers yang bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kebijakan ini disambut dengan aksi damai di kampus-kampus. Namun, aparat pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelanggar hukum ini dengan memukuli dan melecehkan mahasiswa yang tampak seperti bagian dari perjuangan reformasi.²²

Atas kebrutalan aparat pemerintah yang disuruh oleh ulama konservatif, Khatami, sebagai presiden yang mendukung reformasi hukum, menyatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Selain itu, menteri intelijen Khatami, Hojatoleslam Ali Yunesi, juga mengutuk kekejaman tersebut dan bersumpah untuk mengusut dan mengadili orang-orang yang main hakim sendiri tanpa dasar hukum terlebih dahulu²³. Namun, upaya Khatami ini menemui jalan buntu, sehingga pemerintah tetap melanjutkan kekerasannya terhadap kaum reformis, membatasi kebebasan media, dan membubarkan kelompok-kelompok diskusi. Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi, bahkan damai sekalipun, tidak akan diampuni dan akan direpresi dengan kekerasan.

Perempuan dalam Perspektif Hukum Iran

Hukum pidana Iran pasca revolusi 1979 berlaku tidak ramah gender terhadap perempuan. Republik Islam Iran telah merubah hukum pidana sekuler yang dipakai oleh rezim Shah Pahlevi dengan sistem hukum Islam yang berdasarkan syariah abad ketujuh. Dalam hal ini, Ebadi pernah menangani kasus yang disfungsi dan kekejaman sistem hukum di Iran. Dalam suatu kasus hukum, ada gadis berumur sebelas tahun yang bernama Leila. Pada suatu hari, ketika Leila sedang memetik bunga liar di perbukitan dekat desanya, tiga pria menyelip dan menyerangnya. Mereka kemudian memperkosanya,

²¹ Shirin Saedi, *After Isolation: Mirrors between Parallel*, 9.

²² Zohreh Bayatrizi, *From Marx to Giddens via Weber and Habermas: The politics of social thought in Iran*, *European Journal of Social Theory*, 2015, diakses dari laman: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431015599626>, pada 10 Agustus 2022, 6.

²³ Zohreh, *From Marx to Giddens*, 8.

memukulnya berkali-kali, dan membunuhnya dengan cara melemparkan tubuhnya dari tebing.²⁴

Kasus ini kemudian dilaporkan kepada polisi dan tersangkanya berhasil ditangkap. Satu tersangka secara misterius mati gantung diri di sel penjara dan dua lainnya dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan. Sebab undang-undang pada waktu itu lebih menghargai nyawa seorang laki-laki yang dihukum karena pembunuhan dan pemerkosaan daripada seorang gadis yang diperkosa dan mati dilempar dari tebing. Anehnya, keluarga Leila dianggap bertanggung jawab untuk membayar eksekusi mereka. Sedangkan keluarga tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap, kemudian para tersangka itu dibebaskan.²⁵

Dalam perjalanan mencari keadilan untuk anaknya, orangtua Leila menjadi miskin. Ibunya telah duduk di luar gedung pengadilan setiap hari dengan kain kafan putih, sebagai simbol kekejaman sistem hukum atas kasus putrinya. Saat Ebadi menangani kasus tersebut, para hakim menuduh tindakannya bertentangan dengan Islam. Ia menentang para hakim dengan berpijak pada hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dalam kesimpulan Ebadi, banyak hakim di Republik Islam memiliki pemahaman sedikit atau tidak sama sekali terkait prinsip-prinsip hukum Islam, dan banyak perempuan Iran tidak tahu betapa kejamnya hukum terhadap mereka.²⁶

Republik Islam Iran mempunyai banyak kekurangan dalam hal penegakkan hukum yang berpijak pada pandangan keagamaan yang konservatif. Pandangan tersebut melecehkan para ulama yang berpikiran independen yang menentang ajaran agama dari aturan islamnya yang keras dan membuat kebijakan yang secara ideologis radikal dan terlepas dari kepentingan nasional rakyat Iran. Tetapi seperti penguasa manapun yang ingin melanggengkan kekuasaannya sendiri, dalam beberapa kesempatan ia menunjukkan sensitivitas kepada dunia internasional terkait kecaman masyarakat internasional dan ketidaknyamanan dari masyarakatnya sendiri. Setelah itu, pada tahun 1990-an dan 2000-an, pemerintah membuat beberapa penyesuaian kebijakan pada beberapa aturan dan undang-undang yang tidak manusiawi, sebagai tanggapan terhadap aktivitas Ebadi bersama rekannya di bidang kemanusiaan.

Ebadi beserta teman-teman aktivisnya yang melakukan pembelaan tanpa dibayar sepeserpun menganggap hal ini adalah sesuatu yang pantas dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Ebadi juga mempunyai tujuan yang lebih tinggi yaitu membantu masyarakat Iran untuk berani mengungkapkan pendapat mereka. Ebadi meyakinkan mereka bahwa jika mereka ditangkap karena aksi pro-demokrasi atau karena menyampaikan pendapat mereka tentang hak-hak warga negara atau masalah sensitif lainnya, mereka akan tahu akses ke pengacara yang akan melindungi mereka dengan gratis dan akan menjaga keluarga mereka. Selain itu, Ebadi mempunyai tim psikiater dan dokter yang menawarkan pengobatan secara gratis kepada masyarakat Iran.²⁷

Penutupan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah

²⁴ Pirouz Shoar dan Ghaffari, *News Of The Outside World In The Post-Revolutionary Iranian Press*, Kluwer Academic Publisher, Printed in the Netherlands, 1991, diakses pada laman: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177001654929104700101>, pada 11 Agustus 2022, 13.

²⁵ Pirouz, *News Of The Outside World*, 14.

²⁶ Sayed Mohammad Houshisadat, *Dialectics of Post1979 Iranian Foreign Policy in West Asia*, *International Studies* 55(4) 315–338 Jawaharlal Nehru University, 2018, diakses pada laman: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.11770020881718805295>, pada 14 Agustus 2022, 317.

²⁷ Sayed, *Dialectics of Post1979 Iranian Foreign Policy*, 320.

Sistem pendidikan Iran paling terdampak oleh Revolusi Kebudayaan. Pemerintah menutup seluruh universitas dan perguruan tinggi mengatur ulang kurikulum. Khomeini menyepakati perubahan seluruh elemen yang bertentangan dengan ajaran Islam di universitas-universitas Iran dengan dalih bahwa hal tersebut hanya menghasilkan komunis dan atheis. Ribuan intelektual sekuler ditendang dari sistem, beberapa bahkan diasingkan karena latar belakang pendidikan Barat mereka. Pada saat perguruan tinggi diaktifkan kembali, mahasiswa dinyatakan lulus dengan syarat menyelesaikan mata kuliah hukum Islam Syi'ah.²⁸

Selama empat dekade setelah Revolusi 1979, orientasi kebijakan dan pengambilan keputusan mengarah kepada perubahan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan Iran mengarah pada paradigma perubahan sistem pendidikan yang didasarkan dari pengaruh luar. Untuk alasannya ini, perubahan yang terjadi selama empat dekade Revolusi Islam Iran lebih didasarkan pada kecenderungan politik kelompok penguasa daripada didasarkan pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara luas. Kecenderungan politik yang dijadikan dasar untuk membuat kebijakan politik tertentu dapat menghambat kemajuan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang evolusioner.²⁹

Pandangan keislaman konservatif juga menular di kalangan perempuan Iran. Ketika Ebadi memenuhi undangan dari Rektor Universitas Alzahra, Zahra Rahnavard, untuk memberikan kuliah umum tentang status hukum perempuan. Rahnavard Sendiri, perempuan pertama yang mengepalai universitas sejak Revolusi Islam, adalah seorang cendekiawan dan aktivis terkemuka. Hari itu terjadi di tahun 2003, Rahnavard menyambut Ebadi di ruang kuliah kampus, sebuah gedung tinggi dari bata kuning yang dikelilingi oleh hamparan rumput hijau yang dihiasi oleh perempuan muda yang membaca di bawah pohon sycamore. Forum itu dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang antusias, bahkan mereka rela duduk di luar ruangan karena ruangan utama sudah terisi penuh. Saat sedang mendiskusikan dimana harus meletakkan mimbar, tiba-tiba pintu di belakang auditorium terbuka dan sekitar tiga puluh perempuan bercadar masuk, kemudian berteriak keras karena marah.

Jika Ebadi kuliah di sini, maka besok Anda akan meminta George Bush!" teriak mereka, masuk ke arah panggung, di mana Rahnavard dan Ebadi berdiri depannya. Sebenarnya, mereka ini bukanlah mahasiswa, namun penjaga moral yang didukung oleh negara. "Kuliah ini dibatalkan!", mereka melanjutkan teriakannya. Para mahasiswa di depan bangkit dan bergerak ke arah Ebadi, kemudian membentuk cincin pelindung. Rahnavard berjalan maju beberapa langkah, dengan menunjukkan wajahnya yang dipenuhi amarah.³⁰

"Kuliah ini diadakan dengan izin resmi dari universitas. Anda tidak punya hak untuk mengganguya," kata Rahnavard. "Kalian semua harus segera pergi", imbuhnya. Rahnavard dengan berat hati meminta bantuan polisi untuk menginjakkan kaki di lingkungan universitas karena tidak ada pilihan lain mengusir mereka.³¹ Ebadi berterima kasih kepada rektor dan rekan-rekannya atas undangan dan kecerdasan mereka saat menghadapi serangan. Tidak ada

²⁸ Sharnaz Bakhshalizadeh dan Abdol'azim Karim, *Islamic Republic of Iran*, (Boston: Timss & Pirls International Study Center, 2009), 11.

²⁹ Sharnaz, *Islamic Republic of Iran*, 19.

³⁰ Sayed Mahdi Sajjadi, *Development discourses on the educational system of Iran: A critical analysis of their effects*, Policy Futures in Education, 2015, diunduh pada laman: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1478210315569413, pada 10 Agustus 2022, 6.

³¹ Sayed Mahdi, *Development discourses*, 8.

pengusutan dari insiden itu, pihak berwenang tidak melakukan penangkapan, bahkan tidak pernah diketahui dengan persis siapa dalang dibalik peristiwa tersebut. Rahnavard mengancam akan mengundurkan diri jika pihak berwenang tidak menemukan dan menuntut mereka yang bertanggung jawab. Tapi mereka tidak pernah melakukannya, dan setelah pemilihan Mahmoud Ahmadinejad, dia akhirnya mengundurkan diri atau dipecat—tidak pernah jelas.

Ebadi miris melihat kondisi tersebut. Ia sendiri dibesarkan di lingkungan yang memandang pendidikan sebagai sebuah hal berharga untuk setiap manusia. Karenanya, menuntut ilmu setinggi-tingginya adalah barang wajib di keluarganya. Oleh karena itu, kita tidak heran melihat peran perempuan Iran lebih banyak di wilayah domestik atau rumah tangga. Akan tetapi untuk wilayah publik, laki-laki mendapatkan akses tersebut lebih luas, seperti hakim, pejabat, dan lain-lain.

Ebadi sendiri berprofesi sebagai pengacara yang menangani kasus-kasus HAM, khususnya membela hak-hak perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tertindas. Akibatnya, ia sering mendapatkan intimidasi, bahkan sering masuk penjara karena aktivitas perjuangannya. Misalnya, saat dia menjadi pengacara untuk kasus yang menyeret nama pasangan politikus dalam pembunuhan berencana tahun 1999 terhadap Ezzat Ebrahiminejad, mahasiswa Universitas Teheran. Karena campur tangannya, Ebadi dipenjara selama tiga minggu pada tahun 2000. Ia divonis bersalah karena “menggangu opini publik”, ia diberi hukuman penjara. Selain itu, ia dilarang menjalankan praktik hukum selama lima tahun dan didenda, meskipun sanksinya kemudian ditangguhkan.³²

Jelasnya, pendidikan dapat membantu perubahan dalam masyarakat dengan memainkan peran yang dipilih; membantu siswa untuk mengakomodasi perubahan yang telah terjadi masyarakat; membantu siswa mengantisipasi perubahan, arus, dan peluang di masa depan; membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam membuat inovasi dan kreativitas di masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan membawa evolusi dalam masyarakat secara tepat. Dalam pandangan yang lain, pendidikan membantu menciptakan evolusi mendasar dalam masyarakat dengan menghasilkan peluang dan manfaat yang substansial dalam masyarakat; peluang seperti produksi alat kesejahteraan, mendorong orang untuk belajar apa yang dibutuhkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat.³³

Sejatinya, logika yang dipakai untuk perubahan dalam sistem pendidikan adalah paradigma eksternal ke internal. Artinya, perubahan sistem pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sosial, dan ekonomi. Pendidikan harus menjadi pencipta ideologi dan teori, dan tidak boleh bersifat anti terhadap perubahan. Oleh karena itu, tanggung jawab mendasar dari sistem pendidikan adalah untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik.³⁴

Tampaknya untuk mencapai sistem pendidikan yang dapat membawa perubahan di berbagai bidang sosial melibatkan upaya para perencana pendidikan dan pembuat kebijakan tentang tugas dan harapan yang muncul dari masyarakat. Pokok persoalannya adalah apakah wacana pemerintah untuk melakukan perubahan pada sistem pendidikan pasca Revolusi Islam dapat menyelesaikan dan memenuhi tugas dan harapan yang berkaitan dengan sistem

³² Narjes Mehdizadeh, *Beyond cultural stereotypes: Educated mothers' experiences of work and welfare in Iran*, Critical Social Policy, 2012, diunduh pada laman: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0261018312449809 csp.sagepub.com, pada 13 Agustus 2022, 270.

³³ Narjes, *Beyond cultural stereotypes*, 273.

³⁴ Shirin, *Until We Are Free*, 24.

pendidikan di masyarakat. Pemerintah Iran memberikan perhatian serius terhadap sistem pendidikan untuk merubah aturan, struktur, tujuan dan rencana sistem pendidikan untuk mencapai rencana dan tujuan tersebut. Beberapa perubahan itu antara lain: perubahan tanggung jawab organisasi dan lembaga pendidikan, penambahan jumlah wilayah pendidikan di provinsi, kabupaten, serta pelatihan dan penyediaan tenaga kerja dalam rangka koordinasi urusan ibu kota negara dan provinsi.

Ekonomi Berbasis Patriarki

Khomeini memberlakukan sistem ekonomi patriarki di Republik Islam, padahal hampir separuh populasi Iran adalah perempuan. Perempuan juga banyak menjadi lulusan di kampus-kampus terbaik. Namun, mereka adalah minoritas dari populasi pekerja; mereka hampir tidak terhitung dalam sistem politik negara; bahkan, mereka tunduk pada undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif. Sebagai perbandingan, negara-negara yang kaya minyak seperti Aljazair, Iran, Arab Saudi, dan negara lainnya, ditemukan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor ekonomi negara tersebut. Dalam sebuah penelitian, pekerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).³⁵

Di Wilayah MENA, perempuan Iran sendiri kurang berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada yang seharusnya, mengingat perkembangan sosial ekonomi negara dan tingginya tingkat kelulusan pendidikan tinggi dari kalangan perempuan. Alasan minimnya partisipasi perempuan Iran adalah ketatnya sistem struktural dan institusional Iran.³⁶ Secara eksplisit, alasan rendahnya tingkat pekerjaan perempuan di Iran terletak pada sifat dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Iran selama beberapa dekade berangkat dari gender patriarki.

Shirin Ebadi, seorang sarjana feminis, menyebut kondisi di atas sebagai konsep rezim gender. Rezim gender adalah bagaimana hubungan sosial seks diatur di sekitar isu-isu penting tertentu seperti ekonomi dan perburuhan. Ini adalah produk dari strategi pembangunan dan sistem politik suatu negara, dan dapat diamati melalui kerangka hukum dalam menjamin hak-hak sipil, politik, dan sosial formal perempuan. Berbeda dengan negara Maroko dan Tunisia yang berubah ke arah sistem modern, Iran tetap mempertahankan sistem patriarki.³⁷

Sebagai salah satu negara terbesar penghasil minyak, Iran adalah sekutu AS dari tahun 1953 sampai revolusi 1979. Modernisasi terjadi pada 1930-an di bawah Shah Reza Pahlevi, dan perselisihan dengan Inggris atas kendali produksi dan pendapatan minyak Iran meningkat pada awal 1950-an, yang berakhir pada kudeta 1953 menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Modernisasi berlanjut di bawah rezim Pahlevi, dengan pendapatan minyak yang membiayai strategi pembangunan ekonomi dan sosial dengan cepat. Tidak hanya perempuan diberi hak untuk memilih, tetapi periode ini juga melihat peningkatan yang stabil dalam pekerjaan perempuan perkotaan. Di sisi lain, perempuan pedesaan tetap terkonsentrasi pada pekerjaan pertanian dan menenun karpet.³⁸

Kesimpulan

Shirin Ebadi berpandangan bahwa Islam sebagai ajaran yang

³⁵ Nikki R. Keddie, *Women in Iran Since 1979*, SOCIAL RESEARCH, Vol. 67, No. 2 (Summer 2000), diunduh pada laman: <http://www.jstor.org/stable/40971478>, pada 10 Januari 2022, hlm. 413.

³⁶ Nikki R, *Women in Iran Since 1979*, 437.

³⁷ Jahangir Amuzegar, *Iran's Economy: Status, Problems, and Prospects*, diunduh pada laman: <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/JahangirAmuzegarFinal.pdf>, pada 29 Maret 2022, 4.

³⁸ Jahangir Amuzegar, *Iran's Economy*: 6.

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, Islam menjamin hak-hak perempuan, karena sesuai dengan misi Nabi Muhammad di dunia. Namun, para ulama menjelaskan Islam dengan pandangan misoginis. Sehingga, kedudukan perempuan tidak mendapatkan perhatian, bahkan mengalami penindasan.

Sistem pemerintahan Iran terdiri dari kebijakan-kebijakan yang diskriminasi gender. Misalnya, dalam momen pemilu, partisipasi perempuan Iran dalam struktur politik termasuk terendah di dunia. Selain itu, pemerintah Iran menetapkan wajib jilbab bagi perempuan ketika berada di ruang publik. Bagi istri yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, mereka wajib mendapatkan izin dari suami meskipun mereka sudah memiliki paspor yang sah.

Daftar Pustaka

- Afshar, Haleh. 1997. *Women and Work in Iran*. University of York, Political Studies XLV, 755-767.
- Alikarimi, Leila. 2019. *Women & Equality in Iran: Law, Society and Activism*. London. New York: I.B. Tauris. 339 pages. £85.00 (hbk), £91.80 (ebook). ISBN: 978-1-7845-33168.
- Basmechi, Farinaz. 2019. *Feminist Activism in Iran after the 1979 Revolution*, Texas: University of Nort Texas.
- Ebadi, Shirin. 2006. *Iran Awakening from Prison to Peace Prize: One Woman's Struggle at The Crossroads of History*. Canada: Library and Archives.
- _____. 2008. *La Jaula de Oro*. eBooks Con Estilo.
- _____. 2016. *Until We Are Free My Fight for Human Rights in Iran*. New York: Random House.
- _____. TT. *The Golden Cage, Three Brothers, Three Choices, One Destiny*. North American: Kalespree.com.
- Ferdows, Adele K. 1983. *Women and The Islamic Revolution*, J. Middle East Stud. 15
- Hasan, Huma. 2014. Centre for Women's Studies AMU. India: Aligarh.
- Hoodfar, Homa. *Against All Odds: The Building of a Women's Movement in the Islamic Republic of Iran*, Association for WOMen's Rights in Development.
- Mahdavi, Mojtaba. 2010. *Department of Political Science. University of Alberta. 10-25 Tory Building*. Edmonton: Alberta, Canada, T6G 2H4.
- Moghadam, Valentine M. 2017. *Women in the Islamic Republic of Iran: Legal Status, Social Positions, and Collective Action*, <https://www.wilsoncenter.org/>,
- Moghissi, Haideh. 2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Panah, Maryam. 2007. *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution*. Pluto Press: 232 pp. ISBN: 978-0-745-32621-4 (hbk) £45
- Povey, Elaheh Rostam. 2001. *Feminist Contestation of Institutional Domains in Iran*, Feminist Review ISSN 0141-7789 print/ISSN 1466-4380 online © Feminist Review Collective <http://www.tandf.co.uk/journals> DOI: 10.1080/01417780011007011 1.
- Sadeghi, Fatemeh. 2010. *Bypassing Islamism and Feminism: Women's Resistance and Rebellion in Post-revolutionary Iran*. The Netherlands: Department of Social and Behavioral Sciences. University of Amsterdam.
- Sulaeman, Dina Y. 2013. *A Note from Tehran: Refleksi Perempuan Indonesia tentang kebangkitan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Citra
- Varzi, Roxanne. 2011. *Iran's French Revolution: Religion, Philosophy, and Crowds*, ANNALS. AAPSS, 637.

- Adinugraha, Hendri Herman. dkk. 2018. *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender (p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1.
- Mahmudi, Hoda. *Freedom and the Iranian Women's Movement*, Contexts, Vol. 18, Issue 3, pp. 14-19. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. <http://contexts.sagepub.com>. DOI 10.1177/1536504219864953.
- _____. *Freedom and the Iranian Women's Movement*. Contexts, Vol. 18, Issue 3, pp. 14-19. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. <http://contexts.sagepub.com>. DOI 10.1177/1536504219864953.
- Moghadam, Valentine M. 2002. *Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate* Author, Signs, Vol. 27, No. 4 pp. 1135-117
- _____. *Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate* Author, Signs, Vol. 27, No. 4 (Summer 2002), pp. 1135-1171.